

# SETNAS OGI MENYELENGGARAKAN ACARA "SATU DASAWARSA OPEN GOVERNMENT INDONESIA"

OGI NEWS

FEBRUARI, 7 2023



## SATU DASAWARSA OGI: PELUNCURAN RAN OGI VII TAHUN 2023-2024

Jakarta - (07/2) – Sekretariat Nasional Open Government Indonesia (OGI) menyelenggarakan Acara Satu Dasawarsa OGI untuk memperingati perjalanan pemerintah Indonesia dalam mendorong keterbukaan pemerintah melalui keanggotaannya pada *Open Government Partnership* (OGP). Acara ini bertepatan pula dengan agenda peluncuran dokumen Rencana Aksi Nasional OGI VII Tahun 2023-2024.

Acara Satu Dasawarsa OGI dibuka dengan sambutan kunci dari Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, yang berbicara tentang keterbukaan pemerintah sebagai strategi pencapaian pembangunan berkelanjutan. Sambutan kunci tidak hanya menggarisbawahi pentingnya pengarusutamaan keterbukaan pemerintah bersama dengan masyarakat, melainkan juga menonjolkan bukti konkrit dampak keterbukaan pemerintah dalam proses pembangunan.

Acara juga mengundang Kepala LKPP, Hendrar Prihadi, untuk memberikan sambutan kunci mengenai

Jakarta - (07/2) – To commemorate Indonesia's journey of practicing open governance through its membership in the Open Government Partnership (OGP), the Open Government Indonesia (OGI) National Secretariat held an event with the theme "A Decade of OGI". The event is also held to launch the 7th OGI National Action Plan Year 2023-2024.

The event was opened by a keynote speech from the Minister of National Development Planning/Head of Bappenas, Suharso Monoarfa, who spoke about open governance as a strategy to achieve sustainable development. The speech highlighted not only the importance of mainstreaming open governance collaboratively with civil society, but also evidence of its impacts in the development process.

The event also invited the Head of the National Public Procurement Agency (LKPP), Hendrar Prihadi, to give a keynote speech on conducting public procurement with integrity, and the Minister of State Apparatus-

pengadaan pemerintah yang berintegritas, serta Menteri PAN dan RB yang diwakili Deputy Pelayanan Publik, Diah Natalisa, untuk memberikan sambutan kunci mengenai transformasi digital untuk pelayanan publik yang partisipatif.

Sambutan kunci diikuti oleh prosesi Peluncuran RAN OGI VII Tahun 2023-2024, yang mengundang pemangku kepentingan dari Kementerian/Lembaga (K/L) dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) untuk meresmikan peluncuran dokumen tersebut. RAN OGI VII Tahun 2023-2024 terdiri dari enam isu strategis yang sebelumnya ditetapkan dari penjangkaran masukan publik. Enam isu strategis tersebut antara lain: 1) anti-korupsi dan anggaran; 2) ruang kewargaan dan demokrasi; 3) pelayanan publik yang inklusif; 4) akses terhadap keadilan; 5) gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI); dan 6) energi, lingkungan, dan sumber daya alam. Enam isu strategis tersebut tertuang dalam 15 komitmen yang akan dilaksanakan bersama oleh 21 K/L dan 16 OMS.

Untuk mendalami isu keterbukaan pemerintah, acara juga mengundang pemangku kepentingan dari beragam latar belakang dalam sebuah diskusi panel bertema "Satu Dasawarsa Keterbukaan Pemerintah: Mewujudkan Pembangunan yang Transparan dan Partisipatif". Panelis terdiri dari Bupati Sumedang, Deputy Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP, Asisten Deputy Transformasi Digital Pelayanan Publik Kementerian PANRB, dan Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Diskusi panel mengundang Koordinator Tim Ahli Setnas SDGs dan OGP Envoy, Yanuar Nugroho, untuk memandu sesi sebagai moderator. Dari diskusi tersebut, kesimpulan kunci yang dapat diambil adalah pentingnya menjadi individu yang reformis dan pentingnya penguatan aktor masyarakat sipil untuk mendorong keterbukaan pemerintah. Kesimpulan lain yang penting adalah perlunya pemanfaatan alat, termasuk teknologi, untuk menghubungkan warga dengan pemerintah secara bermakna, termasuk kelompok rentan yang sulit mendapatkan akses terhadap pelayanan.

-Utilization and Bureaucratic Transformation (PANRB) who was represented by the Deputy of Public Services, Diah Natalisa, who spoke about digital transformation to advance participative public services.

This sequence was followed by the Launch of the 7th OGI NAP Year 2023-2024, which invites stakeholders from Ministries/Institutions and Civil Society Organizations (CSO) to officiate the launch of the document. The 7th OGI NAP Year 2023-2024 consists of six strategic issues, which were chosen based on previous public inputs received. The six strategic issues are: 1) anti-corruption and budgeting; 2) civic space and democracy; 3) inclusive public services; 4) access to justice; 5) gender, disability, and social inclusion (GEDSI); and 6) energy, environment, and natural resources. The six strategic issues are raised in 15 commitments which will be carried out collaboratively by 21 Ministries/Institutions and 16 CSOs through co-creation.

To delve further into the subject of open governance, the event also invited stakeholders from various backgrounds in a panel discussion themed "A Decade of Open Governance: Realizing a Transparent and Participatory Development". The panelists were comprised of the Sumedang Regent, the Deputy of Digital Procurement Transformation from LKPP, the Asistent Deputy of Digital Transformation for Public Services from PANRB, and a member of the Board of Trustees for the Association for Elections and Democracy (Perludem). The discussion panel was moderated by the Expert Coordinator for the SDGs National Secretariat and OGP Envoy, Yanuar Nugroho. From the discussion, the key takeaway is the importance of reforming individuals and strengthening civil society actors to become "champions" in advocating for open governance. Another important takeaway is the utilization of tools, including technology, to connect the public with the government, including vulnerable groups and those who struggle with access to services.

Acara Satu Dasawarsa OGI dihadiri oleh perwakilan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Kedutaan Besar Britania Raya, Mitra Pembangunan, Masyarakat Sipil, dan media massa.

Acara dapat ditonton melalui kanal YouTube resmi Bappenas dan Open Government Indonesia.

"A Decade of OGI" was attended by representatives from Ministries/Institutions, Local Government, the British Embassy, Development Partners, Civil Society, and media.

The event can be streamed through Bappenas and Open Government Indonesia's official YouTube channels.